



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku selesai menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2022 ini merupakan bagian dari rangkaian dari proses perencanaan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun untuk menjabarkan rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2022 agar dijadikan sebagai peta jalan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan harapan program P4GN yang dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan Provinsi Maluku yang bersih dari narkoba.

Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Tahun 2022 ini dapat menjadi media untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku yang akan datang.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Maluku**



Rohmad Nursahid

f **Drs. Rohmad Nursahid, M.Si** *f*

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Universitas Indonesia Tahun 2019 tentang Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba pada Kelompok Pelajar dan Mahasiswa, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia mencapai 3,2% atau setara dengan 2.297.492 orang dengan rincian coba pakai 1,40%, Pecandu 0,17, Teratur Pakai 0,44 dan Narkoba Suntik 0,06.

Penelitian yang sama dilakukan pada Tahun 2019 untuk angka coba pakai pada kelompok masyarakat cenderung menurun dari waktu ke waktu, untuk kategori pernah pakai Tahun 2011 angka prevalensi sebesar 2,23%, pada Tahun 2014 angka prevalensi menurun menjadi 2,18, Tahun 2017 angka prevalensi turun menjadi 1,77% dan Tahun 2019 angka prevalensi meningkat menjadi 1,80%.

Jenis narkoba yang banyak dikonsumsi dalam setahun terakhir tetap masih ganja. Sekitar 1 dari 5 orang penyalahguna masih tetap mengkonsumsi ganja (25%), berikutnya shabu (12%), ekstasi (5%) dan tramadol (5%). Satu dari 8 orang penyalahguna mengkonsumsi shabu, sedangkan ekstasi dan tramadol lebih jarang lagi, yaitu 1 dari 20 orang, sedangkan jenis narkoba lainnya kurang dari 4%.

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan. Untuk itu narkoba merupakan masalah yang tidak bisa dianggap

dan dipandang sebelah mata. Penyalahgunaan narkoba telah melewati batas negara. Kondisi keamanan dan penanggulangan peredaran narkoba secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan masyarakat sebagai akibat dari kondisi perekonomian dan keamanan negara yang memprihatinkan. Permasalahan narkoba hingga melampaui batas-batas negara yang memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia serta ikatan yang kuat antara anggota mengakibatkan TOC (*Transnational Organized Crime*) semakin meluas hingga ke seluruh daerah.

Keberadaan Provinsi Maluku sebagai "Provinsi Kepulauan" dengan jumlah pulau kurang lebih 1.340 buah didiami oleh kurang lebih 1,8 juta jiwa, terbagi atas 11 Kabupaten/Kota dan menjadi provinsi terdepan yang berbatasan dengan Australia serta Timor Leste. Dengan kondisi geografis yang begitu sulit dan banyak pintu masuk melalui laut maupun darat, memberi ruang terhadap masuknya dan berkembangnya peredaran gelap narkoba di Maluku, kondisi ini dipengaruhi juga dengan keterbatasan tenaga dan sarana penunjang baik dari BNN Provinsi Maluku sebagai leading sektor Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan stakeholder pengawasan lainnya di Maluku sehingga berdampak pada keterbatasan pengawas dilapangan sehingga mengakibatkan semakin tingginya pasokan narkoba di Provinsi Maluku.

Upaya pemberantasan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dan layanan rehabilitasi akan terus dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku dalam bentuk diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan melalui pelaksanaan intelijen, penyidikan jaringan peredaran gelap narkoba, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pencarian terhadap Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Prekursor Narkotika

pelaksanaan interdiksi di wilayah udara, laut, darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti serta rehabilitasi melalui penguatan lembaga instansi pemerintah, komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pasca rehabilitasi terus dilakukan oleh BNN Provinsi Maluku agar mengurai kompleksitas peredaran gelap narkoba.

Dalam mengatasi permasalahan angka prevalensi penyalahguna narkoba, BNN sebagai leading sektor mendapatkan alokasi anggaran APBN T.A 2022 termasuk jajaran BNNP dan BNNK, dukungan anggaran APBN Tahun Anggaran 2022 meliputi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), diharapkan menyentuh langsung semua elemen masyarakat di Provinsi Maluku.

2. Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Maluku terus mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari capaian pengungkapan kasus kejadian narkoba dimana pada Tahun 2019 capaian realisasai berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 sebanyak 11 berkas perkara, Tahun 2020 sebanyak 10 berkas perkara dan Tahun 2021 meningkat menjadi 14 perkara, selain itu dalam bidang rehabilitasi telah dilaksanakan rawat jalan kepada 24 klien penyalahguna narkoba dan dilaksanakan program Intervensi Berbasis Masyarakat di 5 Desa/kelurahan/Negeri di Kota Ambon dan Maluku Tengah serta telah dilakukan kajian kepuasan penerima layanan rehabilitasi dalam rangka pembinaan lanjut layanan pascarehabilitasi kepada 40 klien yang selesai mendapatkan layanan rehabilitasi dan telah pulih, produktif dan berfungsi sosial dari penyalahgunaan narkoba. Dibidang Pencegahan BNN Provinsi Maluku juga melakukan 84 kegiatan diseminasi informasi melalui

Media Konvensional, *Placement* Televisi Daerah, *Placement* Radio Local, Media Online, Media Cetak, Media Luar Ruang, *Branding*, Insert Konten, dengan jumlah sasaran sebaran informasi sebanyak 288.150 orang yang berasal dari kelompok pekerja, pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat.

Terlepas dari capaian Kinerja BNN Provinsi Maluku tersebut, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang mempengaruhi kinerja BNNP Maluku, diatanya sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran, mekanisme sebaran anggaran *Top Down* sangat tidak ideal karena tidak mengakomodasi kebutuhan anggaran BNNP dan jajaran.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, ketersediaan SDM BNNP dalam hal ini pegawai BNNP bila dibandingkan dengan DSP sangat tidak ideal.
3. Letak geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari gugusan pulau sehingga menyebabkan BNNP sangat sulit menjangkau daerah-daerah terluar di wilayah Provinsi Maluku.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
BNN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2022

Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menetapkan rencana kinerja Tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2022. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Maluku Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/ Kota	Rp. 224.000.000
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/ Kota	Rp. 308.000.000
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	2 Kabupaten/ Kota	Rp. 666.840.000
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari	1 Kawasan	Rp. 112.000.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	Alternatif	wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	"Bahaya" menjadi "Waspada"		
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	3	
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 Orang	Rp. 246.526.000
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang	
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	2 Lembaga	Rp. 303.730.000
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	3 Unit	
7.	Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Maluku	3,2	Rp. 66.100.000
8.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	1 Jaringan	Rp. 50.000.000
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	5 Berkas Perkara	Rp. 700.000.000
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	Rp. 304.425.000

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
		narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100	
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	95 2 Kabupaten/ Kota	Rp. 156.212.000
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	95 2 Kabupaten/ Kota	Rp. 3.565.804.000

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Maluku Tahun 2022 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Maluku tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Maluku, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output
Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku
Tahun 2022

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i> Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	1 Lembaga 20 Orang
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	15 Keluarga 8 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkotika	6 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang berubah status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)	Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	1 Kelompok Masyarakat -

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	<p>Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih</p> <p>Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis</p>	<p>Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan</p> <p>Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi</p> <p>Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis</p>	<p>15 Orang</p> <p>-</p> <p>25 Orang</p>
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	<p>1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi</p> <p>2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP</p>	<p>Lembaga rehabilitasi yang operasional</p> <p>Lembaga Rehabilitasi Narkoba yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p>	<p>4 Lembaga</p> <p>4 Lembaga</p>
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	<p>Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi</p>	<p>Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang terbentuk</p> <p>Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional</p>	<p>1 Lembaga</p> <p>-</p>
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	<p>Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)</p> <p>Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21</p>	<p>Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika</p> <p>Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika</p>	<p>1 Jaringan</p> <p>5 Berkas Perkara</p>

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*) Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkotika dan non-narkotika Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika dan TPPU	-
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	5 Orang
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen 1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	Layanan Manajemen Keuangan Layanan Perkantoran	12 Layanan 1 Dokumen